



Perilaku dan Sikap Politik



1. Sosialisasi Politik
2. Pendidikan Politik
3. Perilaku dan Sikap Politik
4. Perilaku Kebersamaan (*Collective Behaviour*)

SOSIALISASI POLITIK



1. Alexis S. Tan dalam *Mass Communication; Theories and Research*, mengatakan “sosialisasi politik merupakan proses perubahan perilaku yang berhubungan erat dengan proses belajar. Dalam proses ini terjadi penyetaraan pemahaman terhadap segala peristiwa politik”.
2. Sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan di mana individu-individu berada.
3. Komunikasi dan sosialisasi adalah unsur yang dapat dipadukan, keduanya dapat pula menyajikan unsur dinamis lain yaitu aktivitas manusia dengan segala konsep berfikirnya.
4. Jadi, sosialisasi politik adalah upaya dinamis untuk mempertahankan suatu nilai yang dirasakan manfaatnya di dalam menggerakkan dinamika masyarakat ke tingkat kehidupan yang berkualitas.

Hakikat Sosialisasi Politik



Sosialisasi politik merupakan hakikat kehidupan manusia dalam suatu tatanan sistem politik

1. Suatu bangsa atau masyarakat negara yang ingin mempertahankan sistem nilai yang sedang berlangsung dan mengestafetkan ke generasi berikutnya
2. Pada filosofinya, sosialisasi politik adalah hakekat manusia yang ingin mengembangkan nilai-nilai pribadi dan pola keyakinan di dalam lingkup suatu sistem
3. Sistem politik suatu negara akan mempengaruhi kepribadian politik warga negaranya, karena itu sosialisasi politik lebih bersifat sorotan psikologis, yaitu pembentukan sikap perilaku dan kepribadian
4. Jadi, sosialisasi politik adalah proses yang berlangsung relatif lama dan rumit sebagai produk saling mempengaruhi antar individu dengan cara menyetarakan simbol-simbol politik sesuai kapasitas yang dimiliki setiap tahapan (untuk tahapan ini baca pemikiran David E. Apter)

Tujuan Sosialisasi Politik



Dalam kehidupan sistem politik suatu negara, sosialisasi politik berorientasi kepada kepentingan dan keutuhan bangsa, karena itu tujuan sosialisasi politik dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu:

1. Dimensi **psikologis**. Tahap ini disebut juga *political effectation*. Dimana pribadi-pribadi manusia 'memilih dan membandingkan sesuai dengan yang diminati' dalam tahap ini pelestarian sistem politik sekaligus sistem nilainya telah dapat didekati
2. Dimensi **ideologis**. Merupakan proses penerimaan ideologi yang telah menjadi pola keyakinan. Ideologi telah menjadi nilai-nilai yang mempedomani sikap perilaku kehidupan bernegara, sehingga pengaruh-pengaruh kontemporer tidak memberi makna yang berarti
3. Dimensi **normatif**. Terintegrasinya sikap mental dan pola fikir ke dalam sistem norma yang berlaku, norma menunjukkan kaedah-kaedah yang dibentuk penguasa dan berkembang dalam masyarakat.
4. Jadi, apabila ketiga dimensi di atas wujud, maka sasaran antara dan tujuan antara sosialisasi politik telah berhasil dan upaya pelestarian sistem politik dan sistem nilai telah dapat di dekati.



PENDIDIKAN POLITIK



1. “Suatu aktifitas mempengaruhi, mengubah dan membentuk sikap perilaku berdasarkan nilai-nilai yang telah dianggap benar dan telah memberi manfaat bagi kehidupan umat manusia”.
2. “Pola pendidikan politik pada negara-negara penganut sistem totaliter akan berbeda dengan penganut sistem demokrasi”.
3. Beberapa bentuk pendidikan politik: 1) pendidikan politik nasional (*Civic*); 2) Pendidikan politik partai atau kelompok; 3) menginterpretasi simbol-simbol kekuasaan; dan 4) menginterpretasi simbol-simbol kebenaran dan keadilan.



Pendidikan Politik Nasional (*Civic*)



1. Yaitu pendidikan politik berdasarkan pola yang telah ditetapkan dan dilakukan secara berjenjang, dimulai pendidikan dasar sampai perguruan tinggi
2. Pendidikan ini bersifat formal karena diselenggarakan oleh pemerintah dan oleh masyarakat berdasarkan panduan pemerintah
3. Tujuan pendidikan politik nasional ini adalah: a) mempersiapkan generasi penerus sebagai penerima dan pelanjut nilai (sistem politik, pola keyakinan, dan sistem budaya); b) menyamakan sistem berfikir tentang nilai-nilai yang dapat mempedomani aktivitas kehidupan bernegara; c) memantapkan sikap jiwa dalam melaksanakan sistem nilai sekaligus membangun hasrat melestarikannya.



Pendidikan Politik Partai atau Kelompok



Pendidikan politik ini ditujukan kepada:

1. Kader partai, untuk meningkatkan kualitas kader sebagai calon pelanjut kepemimpinan partai dan kehidupan organisasi. Adapun jenjang pendidikan politik ini adalah: a) pemahaman arti organisasi, loyalitas terhadap organisasi, memantapkan dedikasi; b) membuka wawasan berfikir berdasarkan ideologi partai, menumbuhkan dinamika dan kreatifitas dalam pengembangan organisasi, meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi; c) membentuk kader yang memiliki kemampuan konseptual, berfikir sistematis dan strategis, kemampuan menganalisis peristiwa-peristiwa politik dan cara mengantisipasinya; d) mendidik berfikir futuristik.
2. Pendidikan politik kelompok atau partai ini lebih mengarah kepada tujuan partai atau kelompok, walaupun berakhir pada tujuan/kepentingan nasional namun tetap berdasarkan konsep-konsep yang dilahirkan partai.



Menginterpretasi Simbol-Simbol Kekuasaan



1. Pendidikan politik merupakan proses penguasaan simbol-simbol pribadi (pengenalan, pemahaman, dan aktualisasi)
2. Simbol-simbol kekuasaan terdiri dari seperangkat simbol yang digunakan dalam proses mengoperasikan kekuasaan (legislatif, eksekutif, yudikatif, dls)
3. Pemahaman terhadap bekerjanya masing-masing simbol kekuasaan tersebut di atas akan mendorong pribadi-pribadi mengaktualisasikan diri ke dalam interaksi politik
4. Proses di atas mengandung makna bahwa interpretasi simbol-simbol kekuasaan telah bergeser pada proses mengkonstruksi simbol-simbol komunikasi melalui proses '*encoding*' dan proses '*decoding*' bergantung silih berganti dan saling mempengaruhi.



Menginterpretasikan Simbol-Symbol Kebenaran dan Keadilan



1. Pendidikan politik hakikatnya adalah menemukan dan merumuskan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dan akan ditransparansikan ke dalam kehidupan sehari-hari.
2. Kebenaran dan keadilan sepertinya nisbi (relatif), usaha-usaha merumuskan kebenaran dan keadilan sampai sekarang belum selesai
3. Permasalahan paling besar adalah mengkonkritkan nilai-nilai abstrak tersebut ke dalam struktur norma dan kehidupan nyata
4. Ukuran kebenaran yang diformulasikan ke dalam seperangkat norma yang dibentuk penguasa, yaitu norma hukum dalam wujud peraturan perundang-undangan yang mengikat dan berakibat sanksi langsung.
5. Ukuran kebenaran itu juga berdasarkan norma-norma: adat kesopanan, kesusilaan, dan agama) yang berkembang dalam masyarakat.

Catatan Penting



1. Produk pendidikan politik di dalam menemukan simbol-simbol keadilan dan kebenaran, sebagai tolok ukur untuk memahami sikap perilaku politik inkar atau tidaknya terhadap nilai-nilai yang berlaku.
2. Pendidikan politik baik formal, non formal maupun pendidikan yang diselenggarakan infrastruktur politik merupakan fundamen yang sangat elementer di dalam memelihara dan melestarikan sistem nilai (sistem politik, pola keyakinan, sistem budaya) oleh setiap generasi secara berkesinambungan dan berlanjut.

Ada Pertanyaan?.....

